

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)
Coastal and Beach Community Empowerment Programme Implementation (P2MPP) to Improve Welfare Society (A Descriptive Study on UPKu Bina Insan Bahari, Kilensari Village, District of Panarukan, Situbondo Regency)

Opan Priya Utama, Syech Hariyono
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: syech_hariyono@yahoo.com

Abstract

As one of the efforts to contribute the mitigation and alleviation of poverty, Community Empowerment Board (Bapemas) of East Java, beginning in 2010, had realized P2MPP program which aimed to improve the community welfare, especially the coastal community through managing the Unit of Financial Management and Business (UPKu) as an instrument providing capital loan service to the community. This research aims to describe and to analyze the implementation of P2MPP on UPKu Bina Insan Bahari in Kilensari Village. This research used a qualitative research approach. The used informant determination was purposive technique. The data were collected through observation, interviews, and documentation. After the data was collected and analyzed by the method of data analysis, researchers used triangulation technique to test the validity of data. The results of this research indicated that there were four phases in the implementation of the P2MPP Program done by UPKu Bina Insan Bahari. The first phase was the preparation of UPKu that began with strengthening the UPKu institutional capacity. The second was the socialization done by UPKu through doing election of RTS or community group. The third was the management of funds done by UPKu in the form of fund distribution of P2MPP to RTS or community group and the management of Savings and Loans Business in order to assist community in accessing the funds provided by the government. The last phase was monitoring done by UPKu management in every three months.

Keywords: *Community Empowerment, Implementation, and P2MPP Program.*

Pendahuluan

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal (Bapemas. 2015).

Masyarakat pesisir itu sendiri merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama yang mendiami suatu wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya (Dahuri, Rokhmin. 2001:5).

Di samping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan proganggungan kemiskinan secara

profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu daerah yang menjadi sasaran yaitu Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Alasan lain Desa Kilensari menjadi sasaran adalah banyaknya warga miskin yang terdapat di Desa Kilensari.

Salah satu pola pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikembangkan adalah melalui pemberdayaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai instrument yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). UPKu dalam hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan permodalan baik pada kelompok maupun RTM secara perorangan yang akan memulai maupun melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan (*income generating*). Di Desa Kilensari terdapat UPKu Bina Insan Bahari yang diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat di Desa Kilensari untuk mengembangkan usaha dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Desa Kilensari karena UPKu merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program

P2MPP di tingkat masyarakat. Hal ini karena UPKu yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program atau kelompok masyarakat penerima manfaat, sehingga keberhasilan atau kegagalan usaha kelompok masyarakat penerima manfaat salah satunya karena faktor UPKu.

Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini mendasar pada hasil penelitian yang berfokus pada Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) pada UPKu Bina Insan Bahari di Desa Kilensari. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk memberikan dekripsi, gambaran, fakta-fakta yang ada dilapangan, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Untuk teknik penentuan informan peneliti menggunakan *purposive* sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan di analisis dengan beberapa alur yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan alasan adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, di khawatirkan masyarakat akan mengalami dinamika yang berdampak pada perpanjangan masa penelitian. Selain itu, dengan berfokus pada satu triangulasi peneliti mampu meminimalisir perubahan atau kegagalan pada fokus kajian.

Hasil Penelitian

Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat memiliki 4 tahapan. Tahap pertama yaitu melakukan persiapan dengan meningkatkan kapasitas UPKu, SDM, dan mengembangkan usaha UPKu. Tahapan kedua yaitu tahap sosialisasi yang dilakukan oleh UPKu dan Aparatur Desa Kilensari. Tahap ketiga yaitu tahap pengelolaan dana P2MPP yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi Penyaluran Dana P2MPP dan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam (USP). Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap Monitoring yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Pembahasan

Ada beberapa tahapan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun tahapan-tahapannya antara lain sebagai berikut.

A. Tahap Persiapan UPKu

Pada tahap persiapan pelaksanaan program P2MPP yang dilakukan oleh UPKu Bina Insan Bahari dimulai dengan menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu agar berfungsi dan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun lembaga pelayanan keuangan mikro di Desa Kilensari. Ini meliputi langkah-langkah berikut.

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan UPKu

Persiapan awal yang dilakukan oleh UPKu Bina Insan Bahari di Desa Kilensari adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan UPKu yang diarahkan pada kegiatan fasilitasi yang bertujuan untuk membenah internal UPKu dalam proses persiapan awal sebelum melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini diungkapkan oleh Bintoro (1991)[3] bahwa perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam pembentukan badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas. Tujuannya agar kerja dari UPKu dapat berjalan secara maksimal dan memenuhi prosedur-prosedur yang sudah diterapkan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM pada UPKu Bina Insan Bahari di Desa Kilensari tentu tidak hanya berorientasi pada kemampuan manusia, namun mencakup keseluruhan lingkup organisasi yang terdiri dari sistem penataan organisasi atau sering dikenal dengan sistem manajemen, kebijakan target capaian, strategi pencapaian, dan peraturan organisasi. Lingkup demikian mengisyaratkan adanya tingkat pengembangan kapasitas dari *capacity development* atau *capacity strengthening* yang berarti mengembangkan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*), dan pengembangan kapasitas yang mengedepankan proses kreatif untuk membangun kapasitas yang belum terlihat atau *constructing capacity*. Oleh karenanya, kapasitas peningkatan SDM merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian kegiatan untuk melakukan perubahan multilevel pada diri individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan sistem-sistem guna memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada. Untuk itu peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui proses menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah organisasi, mencari kebutuhan-kebutuhan pengembangan diri dan organisasi, isu-isu dan peluang-peluang yang dapat diperankan organisasi, membuat formulasi strategi dalam proses mengatasi masalah-masalah, dan tentunya merancang sebuah rencana aksi agar bisa terkumpul data penataan sistem organisasi secara baik.

3. Pengembangan Usaha UPKu

Dalam tahap pengembangannya UPKu diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Yang pertama, untuk kegiatan usaha simpan pinjam yang tujuan utama dari kegiatan ini adalah UPKu selaku pihak pengelola dana mampu memajemen dana tersebut dengan baik agar nantinya dana yang dikelola tersebut tidak macet ditengah jalan karena dana tersebut merupakan dana bergulir dari pokmas/RTS satu ke pokmas/RTS yang lain. Yang kedua, UPKu selain mengelola dana program P2MPP, UPKu juga diharapkan mampu memberi masukan dan arahan kepada masyarakat sasaran untuk secara maksimal memanfaatkan sumber daya alam yang ada didaerah mereka dan jika semua berjalan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi di Desa Kilensari akan menjadi nyata (riil). Dan ketiga, UPKu menjalin kemitraan

dengan pokmas/RTS sangat penting baik secara individu atau organisasi. Kemitraan tersebut digalang dengan maksud untuk memfasilitasi atau membuka akses masyarakat kepada sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.

4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha UPKu

Pengembangan sarana prasarana UPKu dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fisik organisasi yang menjadi prioritas kebutuhan dalam mendukung operasional kegiatan dan kinerja UPKu. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor UPKu Bina Insan Bahari, yang digunakan tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

B. Tahap Sosialisasi oleh UPKu

Dalam pelaksanaannya terdapat instrumen penting dalam sosialisasi program P2MPP yaitu harus terdapat sasaran dalam sosialisasi ini. Sasaran sosialisasi adalah RTS (Rumah Tangga sasaran). Penentuan penerima manfaat ditetapkan berdasarkan Musdes dan *hasil kajian* Tim Pendamping yang dimusyawarahkan dengan UPKu serta diketahui oleh Kepala Desa. Menurut data yang didapat dari informan disebutkan bahwa Rumah Tangga Sasaran itu sendiri adalah sasaran penerima manfaat program pada kegiatan usaha simpan pinjam yang dikelola oleh UPKu. RTS penerima manfaat terdiri dari: Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah tangga hampir miskin dan pelaku ekonomi mikro. Jika RTS telah memahami proses dan berminat untuk berpartisipasi dalam program P2MPP, maka selanjutnya akan dibuat Rencana Tindak Lanjut untuk pelaksanaan program P2MPP yaitu pembentukan pokmas yang setiap pokmas terdiri dari 5-10 anggota.

Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh UPKu dan Aparatur Desa Kilensari mulai dari pengenalan pengurus UPKu dan pengawas program P2MPP, kemudian pengenalan program P2MPP yaitu penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan sasaran program P2MPP. Hingga ke tahap pembentukan pokmas-pokmas selaku penerima bantuan pinjaman dana dari Program P2MPP. Terbentuklah pola-pola utama dalam program P2MPP yaitu sebelum proses pencairan dana pihak UPKu maupun Aparatur Desa harus membentuk pokmas sasaran terlebih dahulu, hal ini dikarenakan Bapemas selaku pihak yang membuat program P2MPP tidak akan mencairkan dana jika tahap-tahap dalam pelaksanaan program P2MPP yaitu mulai dari Kepengurusan UPKu hingga pembentuk pokmas tidak berjalan dengan baik.

C. Tahap Pengelolaan Dana oleh UPKu

Pengelolaan dana P2MPP adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan berikut.

1. Penyaluran Dana P2MPP

Penyaluran dana merupakan proses dan prosedur administrasi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, sejak dari pusat, daerah, desa hingga ke UPKu selaku fasilitator bantuan dana P2MPP untuk masyarakat atau pokmas sasaran program. Menurut data yang didapat dari informan disebutkan bahwa dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang bersumber dari APBD Provinsi disalurkan ke rekening Ketua UPKu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai melalui Bank Jatim setempat. Dana kegiatan P2MPP yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer melalui rekening ketua UPKu setelah dikurangi dengan Biaya Operasional Program (BOP) untuk Bapemas Kabupaten.

Selanjutnya dana P2MPP disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan digulirkan secara terus menerus. Analisis penguatan kapasitas yaitu dilakukan dengan cara menghitung anggota RTS/POKMAS, mendata siapa saja yang menjadi anggota RTS/POKMAS serta menyurvei rencana usaha kegiatan yang akan dilaksanakan, setelah usulan tersebut diajukan maka UPKu memproses dan menganalisis usulan kegiatan yang akan dilaksanakan RTS/POKMAS sudah layak atau tidak, jika sudah layak maka UPKu akan melaporkan dan meminta Persetujuan kepada Kepala Desa sebagai Pembina dan pengawas kegiatan Program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai.

2. Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam (USP)

Dalam menjalankan usaha, USP terdiri dari pengurus dan pengawas yang dipilih dalam rapat anggota, pengurus inilah yang akan menjalankan usaha simpan pinjam demi kesejahteraan anggotanya. Dana yang digunakan adalah dari rakyat dan untuk rakyat sehingga disebut dana bergulir seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti (2007:84) yaitu Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Sebelum menentukan penerima pinjaman diadakan survei terhadap calon peminjam yang dilakukan oleh UPKu yang dibantu oleh Pembina yaitu Kepala Desa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi Pokmas dan kondisi kegiatan usaha secara langsung. Dari hasil survei tersebut diadakan analisa untuk mengetahui kelayakan usaha yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nama-nama penerima pinjaman dana bergulir, serta syarat-syarat administrasi lainnya. Survei yang dilakukan oleh UPKu dan Kepala Desa untuk mendapatkan data secara langsung dari Pokmas. Salah satu data yang diminta adalah data penggunaan biaya. Setelah mendapatkan pinjaman modal diharapkan usulan kegiatan Pokmas yang termasuk industri kecil dan menengah dapat berkembang.

Selanjutnya pokmas yang mendapat manfaat program P2MPP harus memenuhi persyaratan-persyaratan peminjaman modal pinjaman dana tujuan dari pemenuhan persyaratan ini agar nanti ada kejelasan siapa saja yang meminjam, usaha atau untuk apa dana tersebut digunakan. Sehingga nantinya UPKu dapat dengan jelas merinci anggaran dan mencatatnya dalam buku laporan UPKu Bina Insan Bahari yang ada di Desa Kilensari. Setelah proses peminjaman modal usaha terlaksana dengan baik kemudian UPKu berlanjut ke tahap jenis pinjaman. Jenis pinjaman yang diberikan UPKu berupa pinjaman modal usaha yang digunakan untuk mengembangkan usaha dengan jangka waktu pinjaman maksimal 10 bulan.

Menurut data yang didapat dari informan disebutkan bahwa UPKu menyediakan peminjaman dana yang nantinya digunakan oleh Pokmas selaku peminjam dana untuk beberapa sektor usaha yang akan dilakukan oleh pokmas. Dana tersebut sebesar 5 juta rupiah untuk tiap pokmas dan prosedur dari syarat peminjaman hingga pengembalian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun nyatanya pokmas kurang begitu menaati aturan yang sudah ditetapkan. Banyak pokmas yang menganggap dana itu sebagai bantuan cuma-cuma dan adanya niat untuk tidak membayar, hal ini dikarenakan ada yang usahanya berhenti ditengah jalan dan ada juga faktor yang mempengaruhi yaitu karena faktor musim menangkap ikan yang terkendala karena faktor cuaca buruk sehingga mengakibatkan pokmas sasaran kesulitan untuk mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

D. Tahap Monitoring

Dalam pelaksanaan program P2MPP di Desa Kilensari agar berjalan dengan baik. Maka, UPKu Bina Insan Bahari selaku fasilitator program P2MPP melakukan monitoring rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk melihat bagaimana perkembangan pokmas sasaran setelah mendapatkan bantuan pinjaman dana P2MPP. Perlu adanya monitoring rutin yang dilakukan oleh Bapemas Provinsi maupun Kabupaten agar tetap terjaga partisipasi masyarakat di Desa Kilensari dan tidak mengalami penurunan partisipasi terhadap Program P2MPP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis data yang diteliti seperti yang telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

a. Melaksanakan Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan pelaksanaan program P2MPP oleh UPKu Bina Insan Bahari dimulai dengan menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu agar berfungsi dan optimal.

b. Melaksanakan Tahapan Sosialisasi oleh UPKU

Pada tahap sosialisasi berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan ini dengan dibuktikan dengan masyarakat paham dalam tahap sosialisasi yang disampaikan oleh UPKu Bina Insan Bahari.

c. Melaksanakan Tahapan Pengelolaan Dana

USP (Unit Simpan Pinjam) yang dikelola oleh UPKu Bina Insan Bahari meliputi tahap pinjaman, persyaratan pinjaman, dan jenis pinjaman yang nantinya berfungsi sebagai pedoman untuk pokmas sasaran dalam peminjaman modal usaha.

d. Melaksanakan Tahapan Monitoring

UPKu Bina Insan bahari dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali untuk melihat perkembangan pokmas setelah mendapat bantuan pinjaman dana. Selain itu monitoring juga dilakukan oleh Kepala Desa Kilensari. Monitoring tidak hanya dilakukan kepada pokmas sasaran tetapi juga kepada pengurus UPKu. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah UPKu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Daftar Pustaka

- www.bapemas.jatimprov.gi.id (Diakses 21 Juni 2015)
Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Edisi ke-3 Penerbit PT. Paradnya Paramita, Jakarta.
Bintoro, 1991. *Mekanisme Pelaksanaan Era Baru*. Jakarta: Bumi Aksara.
Ninik, Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*, Cetakan kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta.